

2024

Perubahan Rencana Kerja
(Renja)

KECAMATAN RUNGKUT

Kota Surabaya

Tahun 2024



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN RUNGKUT
KECAMATAN RUNGKUT**

**Jalan Rungkut Asri Utara I Telp. (031) 8700447, (031) 8781974
S U R A B A Y A - 60293**

**KEPUTUSAN CAMAT RUNGKUT KOTA SURABAYA
Nomor : 050/3500/436.9.18./2022**

**TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

CAMAT RUNGKUT KOTA SURABAYA

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor : 050/22139/436.8.1/2022 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, Camat Rungkut Kota Surabaya perlu menetapkan susunan keanggotaan tim penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Mengingat**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2021-2026
 3. Peraturan Walikota Surabaya nomor 94 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT RUNGKUT KOTA SURABAYA
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Tahun 2024 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Camat Rungkut
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam proses
penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rungkut;
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana
Kerja Kecamatan Rungkut ; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Camat Rungkut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 30 November 2022



Camat,

Abib.S.Sos
Penata Tingkat I

NIP. 196507091986031019

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 050/3500/436.9.18/2022
Tanggal : 30 Nopember 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA TAHUN 2024

No	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Rungkut	KETUA
2	Sekretaris Kecamatan Rungkut	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	ANGGOTA
5	Kepala Seksi Pembangunan	ANGGOTA
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	ANGGOTA
7	Lurah Kalirungkut	ANGGOTA
6	Lurah Rungkut Kidul	ANGGOTA
9	Lurah Kedung Baruk	ANGGOTA
10	Lurah Penjaringansari	ANGGOTA
11	Lurah Wonorejo	ANGGOTA
12	Lurah Medokan Ayu	ANGGOTA
13	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	ANGGOTA

Camat Rungkut,

H. Habib S.Sos
Pejabat Tingkat I
NIP. 196607091986031019



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan	15

BAB II PENDAHULUAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec.Rungkut dan Capaian Renstra Kecamatan Rungkut Tahun 2023	19
--	----

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
--	----

BAB IV PENUTUP	41
----------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kecamatan Rungkut sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen Renja PD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



1.1.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut dan digambarkan pada diagram Gambar I.1:

1. Persiapan Penyusunan Renja PD.

Persiapan penyusunan renja meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja PD

Perangkat Daerah menyusun Ranwal Renja PD paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rencana Strategis (Renstra) PD;
- b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Penyusunan Ranwal Renja PD mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah



b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;

Hasil perumusan Ranwal Renja PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. penutup.

3. Penyusunan Rancangan Renja PD

Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja PD dengan maksud dapat menjamin Rancangan Renja PD telah selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan



kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan Rancangan Renja PD dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Perubahan (Rankhir) Renja PD

Perumusan Rankhir Renja PD, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja PD menjadi Rankhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rankhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rankhir Renja PD disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin

program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rankhir Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi seluruh Rankhir Renja PD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rankhir Renja PD.



6. Penetapan BAPPEDA menyampaikan seluruh Rankhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja PD yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Rungkut Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Rungkut yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor



14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021

I.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Kecamatan Rungkut dari tahap dokumen Ranwal Renja PD sampai dengan dokumen Renja PD dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022.

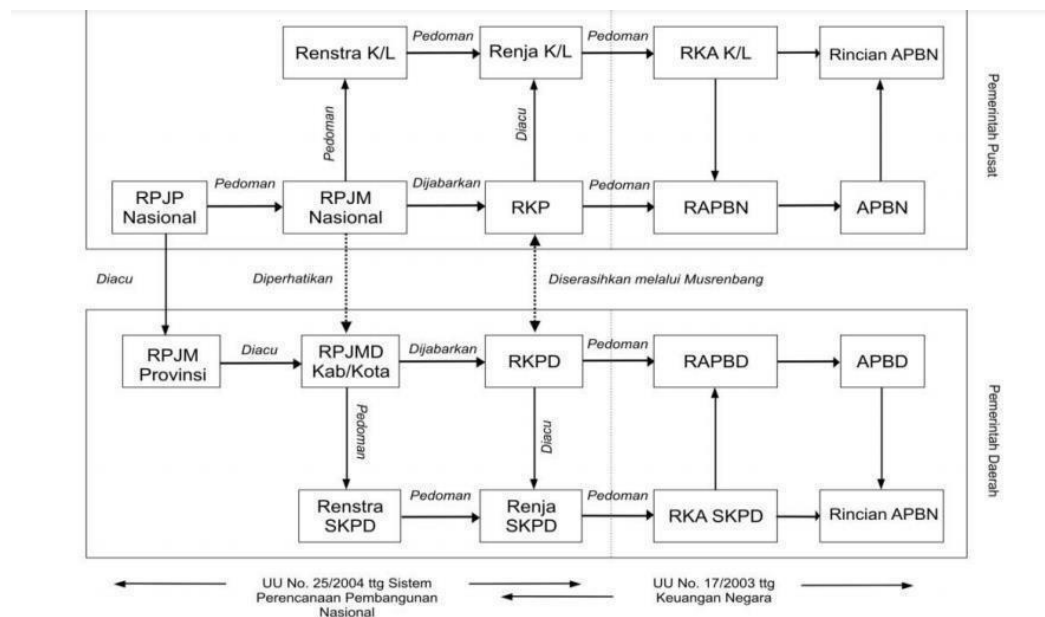
Pada penyusunan Rankhir Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

- a. Berpedoman pada Renstra PD, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja PD dengan Renstra PD.
- b. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.

Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada Gambar I.2:



Gambar I.2
Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



I.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya.
 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024



I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Kecamatan Rungkut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kecamatan Rungkut memiliki tugas:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;



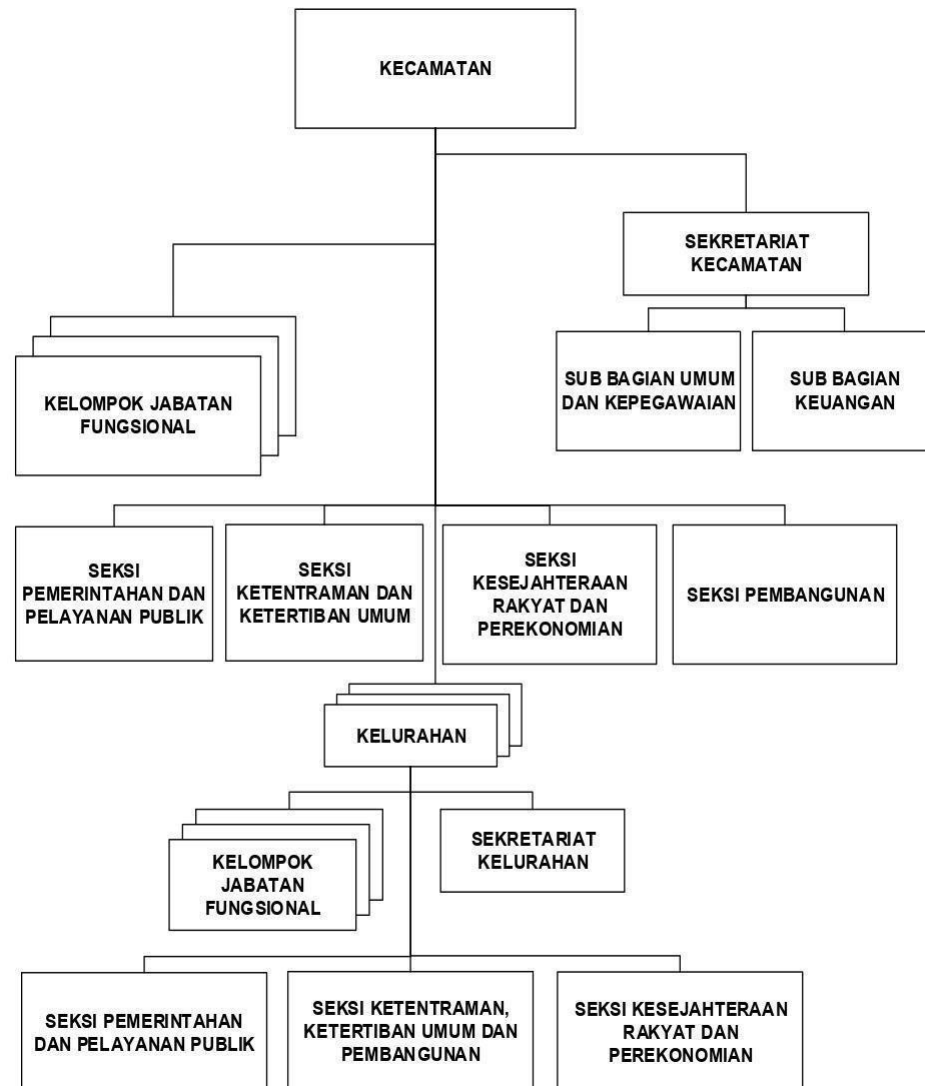
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Rungkut dalam melaksanakannya tugasnya, menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;
2. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;
3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.



Struktur Organisasi Kecamatan Rungkut dijelaskan dalam Gambar 1.3, sebagai berikut:





I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



-
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Surabaya tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Suarabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024



Bab I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rankhir Renja Kecamatan Rungkut Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana jangka pendek (1 tahun) untuk Tahun 2024 pada Kecamatan Rungkut ;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Rungkut dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada dan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rungkut.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tujuan

disusunnya Rankhir Renja Kecamatan Rungkut Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Rungkut dalam jangka waktu 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Rungkut Tahun Anggaran 2024;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.



Bab I.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan

Sistematika dalam dokumen Rankhir Renja Kecamatan Rungkut Tahun 2024 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturanpemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian RenstraPD

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan RenjaPD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal, berisikan uraian mengenai:

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;



2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Pada bagian ini dijelaskan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C33.

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2024 Kecamatan Rungkut melaksanakan 5 (lima) program. Kecamatan mendukung program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Adapun Program yang dilaksanakan Kecamatan Rungkut meliputi;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



Tabel 2.1

Dari Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Rungkut sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dijelaskan kinerja masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dilaksanakan Rungkut melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu

a.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja

Persentase ketepatan waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 97.06 % dan dapat direalisasi sebesar 95.91 %.

Sedangkan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 67 Orang/bulan dan dapat direalisasi 66 Orang/bulan

a.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja

Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi dengan target 100% dan dapat direalisasi sebesar 100%

Sedangkan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 15 Paket dan dapat direalisasi 14 Paket

a.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan dengan target 100% dan dapat direalisasi sebesar 100%



Sedangkan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dengan target kinerja sebanyak 6 unit dan dapat direalisasi sebesar 8 unit

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut :

b.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi dengan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut :

Pada Indikator Kinerja Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan target sebanyak 1 (satu) Laporan dan realisasi sebanyak 1 (satu) Laporan sehingga capaiannya 100%

Sedangkan pada indikator kinerja Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan target sebanyak 497 Lembaga dan realisasi sebanyak 497 Lembaga sehingga capaiannya 100%

b.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan target sebanyak 3 (tiga) Laporan dan realisasi sebanyak 2 (dua) Laporan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan dengan target sebanyak 12 (dua belas) Laporan dan realisasi sebanyak 6 (enam) Laporan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan dengan target sebanyak 30 (tiga puluh) Dokumen dan realisasi sebanyak 15 (lima belas) Dokumen



c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan Kecamatan Rungkut melalui kegiatan Pemberdayaan kelurahan dengan sub kegiatan sebagai berikut:

c.1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target sebanyak 5 Unit dan realisasi sebanyak 0 Unit

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target sebanyak 12 Unit dan realisasi sebanyak 0 Unit

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target sebanyak 10 Unit dan realisasi sebanyak 0 Unit

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target sebanyak 4 Unit dan realisasi sebanyak 0 Unit

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target sebanyak 4 Unit dan realisasi sebanyak 3 Unit

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target sebanyak 10 Unit dan realisasi sebanyak 2 Unit

c.2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan target sebanyak 12 Laporan dan realisasi sebanyak 6 Laporan

Sedangkan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan dengan target sebanyak 74 Unit dan realisasi sebanyak 74 Unit sehingga capaian 100%



d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan di Kecamatan Rungkut pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan indikator kinerja Obyek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang di pantau dan ditertibkan untuk tahun 2024 di target 22 lokasi dan dapat direalisasikan sebanyak 22 Lokasi sehingga capaian 100%

Sedangkan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target sebanyak 12 (dua belas) Laporan dan realisasi sebanyak 6 (enam) Laporan

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rungkut dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas dengan target sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kasus dan realisasi sebanyak 60 (enam puluh) Kasus sedangkan Indikator Kinerja Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan ketahanan nasional tahun 2024 dengan target 2 (dua) topik dan dapat direalisasikan 2 (dua) topik sehingga target tercapai 100%.

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Rungkut sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7		Unsur Kewilayahan																					
07.01		Kecamatan																					
07.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			21,950,098		27,872,139		26,070,150		5,935,751		13,797,769		-		-		19,733,520		47,605,659		216,88%
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.45 %		94.52 %		97.06 %		95.86 %		95.91 %		-		-		95.91 %		95.91 %		98.42%	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,969,408				20,421,735		4,727,112		11,122,022		-		-		15,849,134		15,849,134		79.37%
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100%		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33,513,641				20.421.735		4.727.112		11.122.022		-		-		15.849.134		15.849.134		173,78%
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		67 Orang/bulan		66 Orang/bulan		66 Orang/bulan		-		-		66 Orang/bulan		66 Orang/bulan		N/A	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,840,899				5,546,849		1,200,321		2,646,580		-		-		3,846,902		3,846,902		208.97%
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100%		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,624,599				5.546.849		1.200.321		2.646.580		-		-		3.846.902		3.846.902		236,79%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		15 Paket		14 Paket		14 Paket		-		-		14 Paket		14 Paket		N/A	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			139,792				101,566		8,318		29,167		-		-		37,485		37,485		26.81%
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100%		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			168,09				101.566		8.318		29.167		-		-		37.485		37.485		26,81%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		6 Unit		7 Unit		8 Unit		-		-		8 Unit		8 Unit		N/A	
07.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			5,478,144		36,369		44,684		6,418		14,469		-		-		20,887		57,256		1,05%
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		98.99 %		100%		100.00 %		98.77 %		-		-		98.77 %		98.77 %		98.77 %	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.16 %		53.75 %		37.16 %		81.08 %		81.08 %		-		-		81.08 %		81.08 %		218.19%	

Rencana kerja Tahun 2024

						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %	
7.01.02.2.01						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12,394			1,05		1,05		1,05		-		-		2,100		2,100		16.94%	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		2 Laporan		200.00%
7.01.02.2.01.0001						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12,394			1.050		1.050		1.050		-		-			2.100		2100		16,94%
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A		1		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		2 Laporan		N/A
7.01.02.2.02						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		5,427,372			26,946		5,368			13,419		-		-		18.787		18,787		0.35%
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga		497 Lembaga		497 Lembaga		497 Lembaga		497 Lembaga		-		-		497 Lembaga		497 Lembaga		101.8%
7.01.02.2.02.0003						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4,708,920			26.946		5.368			13.419		-		-		18.787		18.787		0,40%
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Laporan		2 Laporan		5 Laporan		-		-		5 Laporan		5 Laporan		N/A
7.01.02.2.04						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		38,377			16,688		0			0		-		-		0		0		0.00%
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		6 Dokumen		15 Dokumen		-		-		15 Dokumen		45 Dokumen		150.00 %
							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %
							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %
7.01.02.2.04.0003						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		13,399			7.692		0			0		-		-		0		0		0,00%
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		N/A
7.01.02.2.04.0002						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		10,049			8.218		0			0		-		-		0		0		0,00%

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A			N/A			12 Laporan			3 Laporan			6 Laporan		-		-			6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04.0001							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1,675			777		0		0		-	-			0				0		0			0,00%	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A		30		30 Dokumen		6 Dokumen		15 Dokumen		-	-		15 Dokumen		45 Dokumen		N/A							
07.01.03						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			28,859,474		15,087,889		17,871,524		1,068,872		10,400,677		-	-					11,469,549			26,557,439				
							Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100.00 %		100.00 %		0.00 % -	-		100.00 %		100.00 %		100.00 %							
							Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50 %		62.5 %		0.00 %		0.00 %		- 0.00 %	-		0.00 %		0.00 %									

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		28,538,582			17,581,605		1,067,972		10,328,658	-	-			11,396,630		11,396,630		39.93%
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-	-		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-		0 Kelurahan		2 Kelurahan		200.00 %	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833			2.196.018		0		1.786.187	-	-			1.786.187		1.786.187		60,59%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		5 Unit		0 Unit		-	-		0 Unit		0 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833			1.483.768		0		36.637	-	-			36.637		36.637		1,24%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		12 Unit		0 Unit		-	-		0 Unit		0 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833			1.729.364		0		1.630.233	-	-			1.630.233		1.630.233		55,30%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		10 Unit		0 Unit		-	-		0 Unit		0 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833			1.786.583		0		1.710.064	-	-			1.710.064		1.710.064		58,01%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		4 Unit		0 Unit		-	-		0 Unit		0 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833			2.168.568		0		2.135.312	-	-			2.135.312		2.135.312		72,44%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		4 Unit		0 Unit		-	-		3 Unit		3 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833			1.212.957		0		361.201	-	-			361.201		361.201		12,25%
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		10 Unit		0 Unit		-	-		2 Unit		2 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245			1.321.512		220.144		545.811	-	-			765.955		765.955		77,66%
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		2		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245			1.285.505		151.637		378.043	-	-			529.681		529.681		53,71%
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		2		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245			1.071.909		129.384		322.960	-	-			452.344		452.344		45,87%
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		2		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245			1.218.442		156.155		395.400	-	-			551.555		551.555		55,92%
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		2		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245			1.350.869		267.865		672.115	-	-							
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		2		15 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245			752.809		142.787		354.695	-	-							

						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		2		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0001						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		33,497			3.300		0		0			0		0		0,00%
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2	2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-	-	0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		320,892			289,919		900		72,019		-	-	-	72,919		22.72%
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha		110 Unit Usaha		110 Unit Usaha		22 Unit Usaha		55 Unit Usaha		-	-	55 Unit Usaha		165 Unit Usaha	150.00 %
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga		74 Lembaga		74 Lembaga		0 Lembaga		74 Lembaga		-	-	74 Lembaga		74 Lembaga	100.00 %
7.01.03.2.03.0004						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		31,822			9.000		900		4.500		-	-	-	5.400		16,97%
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan	N/A
7.01.03.2.03.0003						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		142,820			280.919		0		67.519		-	-	-	67.519		47,28%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	N/A		N/A		74 Unit		0 Unit		74 Unit		-	-	74 Unit		74 Unit	N/A
07.01.04						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		154,049		238,705	153,616		24,948		62,371		-	-	-	87,319		211,64%
						Persentase koordinasi penanganan pelanggaran perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100.00 %		100.00 %		-	-	100.00 %		100.00 %	
7.01.04.2.01						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		154,049			153,616		24,948		62,371		-	-	-	87,319		56.68%
						Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		-	-	22 Lokasi		22 Lokasi	100.00 %
7.01.04.2.01.0001						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		309,309			153.616		24.948		62.371		-	-	-	87.319		28,23%
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan	N/A
07.01.05						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		20,098		17,485	15,816		0		3,577		-	-	-	3,577		104,79%
						Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100.00 %		100.00 %		-	-	100.00 %		100.00 %	
7.01.05.2.01						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala		20,098			15,816		0		3,577		-	-	-	3,577		17.80%

						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus		150 Kasus		150 Kasus		30 Kasus		60 Kasus		-				60 Kasus		210 Kasus		140.00 %	
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-		-		2 Topik		4 Topik		200.00 %	
7.01.05.2.01.0002						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		16,749			6.200		0		0		-		-			0		0		0,00%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A		N/A		120 Orang		0 Orang		120 Orang		-		-		120 Orang		120 Orang		N/A	
7.01.05.2.01.0005						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		8,039			9.616		0		3.577		-		-			3.577		3.577		44,49%
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	N/A		N/A		5 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-				2 Laporan		2 Laporan		N/A	

Bab III

Rencana Kerja & Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam hal ini Penjabaran rincian rencana program dan kegiatan perangkat daerah Kecamatan Rungkut (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan seperti pada Tabel 3.1

a. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dengan Kegiatan-kegiatan

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berlokasi di Kecamatan Rungkut dengan Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Target Capaian sebesar 67 Orang/bulan dan Pagu Indikatif 20,421,734,803
2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berlokasi di Kecamatan Rungkut dengan Indikator Kinerja dan Target Capaian sebesar dan Pagu Indikatif
3. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berlokasi di Kecamatan Rungkut dengan Indikator Kinerja dan Target Capaian sebesar dan Pagu Indikatif

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan Target 100% dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dan Target Capaian sebesar 1 Laporan dan Pagu Indikatif 1,050,000
2. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Target Capaian 2 Laporan dan Pagu Indikatif 26,946,000

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan dan Target Capaian 30 Dokumen dan Pagu Indikatif 777
 4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan dan Target Capaian 12 Laporan dan Pagu Indikatif 8,218,355
 5. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan Target Capaian 4 Laporan dan Pagu Indikatif 7,692,480
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Target Capaian sebesar 2 Lembaga Kemasyarakatan dan Pagu Indikatif 3,300,000
 2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lokasi Kelurahan Kali Rungkut dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Target Capaian 5 Unit dan Pagu Indikatif 2,311,658,745
 3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lokasi Kelurahan Rungkut Kidul dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Target Capaian 12 Unit dan Pagu Indikatif 1,483,767,974
 4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lokasi Kelurahan Kedung Baruk dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Target Capaian 10 Unit dan Pagu Indikatif 1,729,364,045

5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lokasi Kelurahan Penjaringan Sari dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Target Capaian 4 Unit dan Pagu Indikatif 1,786,582,881
6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lokasi Kelurahan Medokan Ayu dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Target Capaian 4 Unit dan Pagu Indikatif 2,168,567,612
7. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lokasi Kelurahan Wonorejo dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Target Capaian 10 Unit dan Pagu Indikatif 1,212,957,352
8. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lokasi di Kelurahan Kalirungkut dengan Indikator Kinerja Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Target Capaian 2 Pokmas / Ormas dan Pagu Indikatif 1,205,870,980
9. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lokasi di Kelurahan Rungkut Kidul dengan Indikator Kinerja Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Target Capaian 3 Pokmas / Ormas dan Pagu Indikatif 1,285,505,434
10. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lokasi di Kelurahan Kedung Baruk dengan Indikator Kinerja Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Target Capaian 2 Pokmas / Ormas dan Pagu Indikatif 1,071,909,363
11. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lokasi di Kelurahan Penjaringan Sari dengan Indikator Kinerja Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Target Capaian 2 Pokmas / Ormas dan Pagu Indikatif 1,218,442,385
12. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lokasi di Kelurahan Medokan Ayu dengan Indikator Kinerja Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Target Capaian 15 Pokmas / Ormas dan Pagu Indikatif 1,350,868,850
13. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lokasi di Kelurahan Wonorejo dengan Indikator Kinerja Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Target Capaian 2 Pokmas / Ormas dan Pagu Indikatif 752,809,368

14. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Lokasi di Kecamatan Rungkut dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan dan Target Capaian 74 Unit dan Pagu Indikatif 280,918,800
 15. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Lokasi di Kecamatan Rungkut dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Target Capaian 12 Laporan dan Pagu Indikatif 9,000,000
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Target Capaian 12 Laporan dan Pagu Indikatif 153,615,600
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Lokasi di Kecamatan Rungkut dengan Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Target Capaian 120 Orang dan Pagu Indikatif 6,200,000
 2. Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Target Capaian 5 Laporan dan Pagu Indikatif 9,615,600

Adapun gambaran tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Rungkut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Kec. Rungkut

Tahun 2024

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,06 %	26,070,149,840	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,06 %	28,279,695,424	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	20,421,734,803	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	22,016,757,652	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	20,421,734,803	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	22,016,757,652	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	5,546,848,651	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	6,181,688,2233	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rungkut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,546,848,651	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rungkut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6,181,688,2233	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	101,566,386	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	81,249,549	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	101,566,386	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	81,249,549	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	44,683,835	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	44,683,835	

			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,16 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,16 %		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,050,000	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,050,000	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,050,000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan	1 Laporan	1,050,000	
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	497 Lembaga	26,946,000	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	497 Lembaga	29,521,000	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26,946,000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29,521,000	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang diimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	16,687,835	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang diimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	16,687,835	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		
			7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rungkut	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	777,000		7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rungkut	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	777,000		
			7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,218,355		7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,218,355		
			7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,692,480		7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,692,480		
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	17,871,523,789	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	17,871,523,789	
					Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100 %						Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	17,581,604,989	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	17,581,604,989	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	2 Lembaga Kemasyarakatan						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	2 Lembaga Kemasyarakatan		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Rungkut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3,300,000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Rungkut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3,300,000	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,196,017,835	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,374,475,310	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,483,767,974	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,483,767,974	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,729,364,045	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,729,364,045	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,786,582,881	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,786,582,881	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,168,567,612	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,168,567,612	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,212,957,352	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,212,957,352	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	2 Pokmas / Ormas	1,321,511,890	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	2 Pokmas / Ormas	1,143,054,415	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kelurahan					Kelurahan			
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,285,505,434	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,285,505,434	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,071,909,363	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,071,909,363	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,218,442,385	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,218,442,385	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1,350,868,850	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1,350,868,850	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	752,809,368	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	752,809,368	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga	289,918,800	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga	289,918,800	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha		
	7.01.03.2.03.0003	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan	74 Unit	280,918,800	7.01.03.2.03.0003	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan	74 Unit	280,918,800	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan			
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9,000,000	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9,000,000	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	153,615,600	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	155,083,800	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	153,615,600	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	155,083,800	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153,615,600	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	155,083,800	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	15,815,600	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	15,815,600	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus	15,815,600	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus	15,815,600	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan	2 Topik		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			ketahanan nasional					ketahanan nasional			
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	6,200,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	6,200,000	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	9,615,600	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	9,615,600	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Rungkut Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Rungkut pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Rungkut Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 6 Agustus 2024

Camat Rungkut

Kota Surabaya



Maskur. SH. MH

Pembina

NIP.197007011994031009